

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Dwiyanto, Agus. 2006. "*Transparansi Pelayanan Publik*", dalam Agus Dwiyanto,ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE: Yogyakarta
- Hartani, sri, dkk, 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- IKAPI, 2010. *Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil*. Fokus Media: Bandung
- Jefferson, Rumajar, 2006. *Otonomi Daerah : Sketsa, Gagasan Dan Pengalaman*. Media Pustaka : Manado.
- Kaloh, J, 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Moekijat.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju: Bandung.

- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Motik, Suryani Sidik. 2003. "*Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi*". Sinar Garfika: Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Santosa, Pandji, 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Reflika Aditama: Bandung
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian 2*. Mandar Maju: Bandung
- Simamora, Henry, 1999. *Manajemen sumber Daya Manusia edisi Ke Dua Cetakan Ke dua*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Tahir, Arifin, 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pustaka Indonesia Press: Jakarta
- Thoha, Miftah, 2005. *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Galia Indonesia: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2001. *Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jatinangor : Bunga Rampai
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia : Surabaya.

B. Dokumentasi

- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
- PP No 48/2005 jo PP 43/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
- Pemerintah Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS

C. Media

<http://sibigao.wordpress.com/2008/12/22/rekrutmen-sumber-daya-manusia-sdm-pada-multi-national-corporation-mnc%E2%80%99s/> : diakses tanggal 8 September 2014, 10.00 WIB

<http://psychosystem.wordpress.com/2011/02/09/recruitment/>: diakses tanggal 14 September 2014, 08.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri : diakses tanggal 8 September 2014, 09.00 WIB

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zpShpe9m4NgJ:elib.unikom.ac.id/download.php?id%3D7080+teori+tentang+Pegawai+Negeri+Sipil&hl=id&gl=id>: diakses tanggal 10 September 2014, 12.30 WIB

<http://carceres-carceres.blogspot.com/2012/06/faktor-faktor-mempengaruhi-rekrutmen-pegawai/> diakses tanggal 10 September 2014, 16.00 WIB

<http://liveinternet.blogspot.com>. Diakses tanggal 21 oktober 2014, 20.00 WIB

<http://radar.mesuji.com>. Diakses tanggal 8 Januari 2015, 09.00 WIB

<http://mesujikab.go.id>. Diakses tanggal 8 Januari 2015, 10.00 WIB

<http://translampung.com>. Diakses tanggal 8 Januari 2015, jam 11.00 WIB

<http://kabupatenmesujimerintis.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 Januari 2015, 13.00 WIB

D. Jurnal

Ade , 2014. Makalah Ekonomi Syariah. Makalah ekonomi syariah

Lalolo Krina P, 2002 “indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi” [Http// good governance : Bappenas.go.id/informasi.Htm](http://goodgovernance.bappenas.go.id/informasi.htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isra, Saldi. 2002. Konstitusi Baru: Salah Satu Upaya Menyelamatkan Indonesia Dari Keterpurukan. Jawa Barat: Kompas.

Wijaya, Titis, Wiwik, 2011. Korelasi Persepsi Masyarakat Sipil dan Penggunaan Atribut Misliter Di Kota Bandar Lampung. Skripsi